SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Mohamad Akbar[1], Akhmed Reza Fachlevi[2], Sudadi[3]
[1 2 3] Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
[1] sejutamohamadakbar@gmail.com , [2] akhmedreza1990@gmail.com ,
[3] sudadi@uinsi.ac.id

ABSTRACT

This article examines the Sekolah Rakyat (People's School) program as an instrument of inclusive education policy in Indonesia, launched by President Prabowo Subianto through Presidential Instruction Number 8 of 2025. The program emerges in response to persistently high dropout rates and severe inequality in educational access among the extreme poor. Employing a library research approach with policy analysis methods, this article examines the legal foundation, philosophy, curriculum design, implementation patterns, early achievements, as well as academic challenges and critiques of the program. The study also positions Sekolah Rakyat within the theoretical framework of inclusive education, particularly from the dimensions of social justice, accessibility, and structural transformation of poverty through education. The findings indicate that Sekolah Rakyat possesses a strong policy foundation and significant potential as an instrument for equalizing educational access; however, it faces serious challenges including teacher readiness, the risk of social segregation, budget sustainability, and the need for a more transparent and evidence-based evaluation system. This article recommends strengthening governance, multi-stakeholder engagement, and integrating the program with more comprehensive social protection policies so that Sekolah Rakyat can genuinely become a pillar of sustainable inclusive education.

Keywords**:** *Sekolah Rakyat, Inclusive Education, Education Policy, Poverty Alleviation, Social Justice*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji program Sekolah Rakyat sebagai instrumen kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Program ini hadir sebagai respons atas masih tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan pada kelompok masyarakat miskin ekstrem. Menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis kebijakan, artikel ini menelaah landasan hukum, filosofi, desain kurikulum, pola implementasi, capaian awal, serta tantangan dan kritik akademis terhadap program tersebut. Kajian ini juga memposisikan Sekolah Rakyat dalam kerangka teori pendidikan inklusif, khususnya dari dimensi keadilan sosial, aksesibilitas, dan transformasi struktural kemiskinan melalui pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki fondasi kebijakan yang kuat dan potensi besar sebagai instrumen pemerataan pendidikan, namun menghadapi sejumlah tantangan serius yang meliputi kesiapan tenaga pendidik, risiko segregasi sosial, keberlanjutan anggaran, serta kebutuhan akan sistem evaluasi yang lebih transparan dan berbasis bukti. Artikel ini merekomendasikan penguatan tata kelola, pelibatan multipihak, dan integrasi program dengan kebijakan perlindungan sosial

yang lebih komprehensif agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi pilar pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sekolah Rakyat, Pendidikan Inklusif, Kebijakan Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan, Keadilan Sosial

A. PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun demikian, Indonesia masih bergulat dengan tantangan struktural yang berat: jutaan anak dari keluarga miskin tidak mampu mengakses pendidikan yang layak, bukan karena tidak ada sekolah, melainkan karena kemiskinan menciptakan hambatan berlapis yang membuat pendidikan formal terasa seperti kemewahan. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa angka putus sekolah meningkat di seluruh jenjang pada tahun ajaran 2023/2024, dengan 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 422.000 anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem tidak bersekolah atau putus sekolah hingga pertengahan 2025 (BPS, 2025).

Realitas ini mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menginisiasi Program Sekolah Rakyat, sebuah langkah kebijakan berani yang menempatkan pendidikan sebagai senjata utama dalam memerangi kemiskinan antargenerasi. Program ini resmi diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan didukung pula oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang secara eksplisit memuat arah kebijakan pendidikan inklusif (Rendratopan, 2025). Sejak mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, program ini telah berkembang pesat: per Januari 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi, menyerap 7.107 tenaga kerja, dan melayani 15.945 siswa (ANTARA, 2026).

Namun, kehadiran Sekolah Rakyat tidak serta-merta disambut bulat. Di tengah antusiasme publik, muncul pula suara-suara kritis dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, dan pemerhati kebijakan sosial. Pertanyaan tentang potensi

segregasi sosial, kesiapan guru, keberlanjutan anggaran, hingga ketepatan pendekatan boarding school untuk anak-anak termiskin menjadi isu yang tidak bisa diabaikan (UMJ, 2025). Perdebatan ini justru memperkaya diskursus kebijakan dan menjadi sinyal pentingnya evaluasi yang berbasis bukti secara berkesinambungan.

Dalam konteks teori pendidikan inklusif, Sekolah Rakyat menawarkan pendekatan yang melampaui definisi konvensional inklusivitas yang selama ini kerap dipersempitkan hanya pada layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Inklusivitas dalam makna yang lebih luas—sebagaimana yang diadopsi oleh UNESCO (2017)—mencakup penghapusan segala bentuk hambatan, termasuk hambatan ekonomi, geografis, dan sosial budaya yang menghalangi setiap anak dari hak dasarnya atas pendidikan. Dalam bingkai inilah Sekolah Rakyat perlu dikaji secara komprehensif.

Artikel ini hadir untuk mengisi kebutuhan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan berbasis kepustakaan, artikel ini menelaah enam dimensi utama: (1) landasan hukum dan kebijakan, (2) filosofi dan visi program, (3) desain kurikulum dan model pembelajaran, (4) pola implementasi dan capaian awal, (5) tantangan dan kritik akademis, serta (6) rekomendasi kebijakan untuk penguatan program. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berguna bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis kebijakan publik. Sumber data meliputi regulasi perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian, dan sumber daring terpercaya dari institusi akademik dan pemerintahan. Analisis dilakukan secara kritis dan reflektif dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi utama program Sekolah Rakyat dari perspektif teori pendidikan inklusif, kebijakan sosial, dan transformasi kemiskinan melalui pendidikan. Kerangka analisis kebijakan yang digunakan merujuk pada pendekatan George Edward III yang mencakup empat dimensi implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Ibnu & Kurniawan, 2025). Hasil analisis kemudian

diinterpretasikan secara holistik untuk merumuskan rekomendasi penguatan program yang kontekstual dan berbasis bukti (Zed, 2008).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Kebijakan: Fondasi yang Kuat dan Berlapis

Salah satu keistimewaan Sekolah Rakyat dibanding banyak program pendidikan sebelumnya adalah landasan hukumnya yang kuat, berlapis, dan saling menopang. Program ini tidak berdiri pada satu produk regulasi semata, melainkan didukung oleh serangkaian instrumen hukum yang membentuk ekosistem kebijakan yang komprehensif (Rendratopan, 2025).

Pada tataran konstitusional, Sekolah Rakyat berpijak pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pada tataran undang-undang, program ini bersandar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan prinsip keadilan, demokrasi, dan kesetaraan sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan. Di level regulasi teknis, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menjadi instrumen operasional utama, dilengkapi dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 turut mengunci Sekolah Rakyat sebagai bagian integral dari arah pembangunan nasional jangka menengah (Rendratopan, 2025).

Kerangka hukum yang berlapis ini memiliki dua implikasi strategis. Pertama, ia memberikan legitimasi politis yang kuat sehingga program tidak mudah digoyahkan oleh pergantian menteri atau perubahan prioritas sektoral. Kedua, ia menciptakan akuntabilitas lintas kementerian yang memastikan program tidak hanya menjadi beban satu institusi. Koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Ketenagakerjaan mencerminkan pendekatan whole-of-

government yang—jika dieksekusi dengan konsisten—dapat melipatgandakan dampak program (The Indonesian Institute, 2025).

2. Filosofi dan Visi: Lebih dari Sekadar Sekolah Gratis

Sekolah Rakyat bukan semata-mata program sekolah gratis. Ia adalah pernyataan filosofis dan politik yang sangat tegas: bahwa negara bertanggung jawab penuh atas masa depan setiap anaknya, tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya. Visi resmi program ini adalah *"Mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan"* (Kemensos, 2025). Kalimat ini mengandung ambisi yang melampaui sekadar akses: ia berbicara tentang transformasi struktural, tentang memutus rantai kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Filosofi ini memiliki resonansi kuat dengan teori *human capital* yang meletakkan investasi pada pendidikan sebagai faktor penentu produktivitas dan mobilitas sosial jangka panjang (Arifin, 2023). Andreas Schleicher, Direktur Pendidikan OECD, menekankan bahwa memisahkan kendala ekonomi dari proses belajar adalah kunci utama keberhasilan sebuah negara dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan (ANTARA, 2026). Senada dengan itu, Linda Darling-Hammond dari Stanford University mengingatkan bahwa siswa dari latar belakang ekonomi rendah sering membawa trauma kemiskinan ke ruang kelas, sehingga program pendidikan bagi mereka harus menyediakan dukungan psikososial yang memadai, bukan hanya akses akademik semata (ANTARA, 2026).

Dimensi filosofis yang paling menarik dari Sekolah Rakyat adalah posisinya sebagai komplemen dari Program Sekolah Garuda yang berorientasi pada talenta STEM dan inovasi. Jika Sekolah Garuda adalah program untuk mencetak talenta elit yang mendorong daya saing, maka Sekolah Rakyat adalah program untuk menjamin pemenuhan hak dasar yang mendorong keadilan. Sinergi dua jalur ini—keunggulan dan keadilan—mencerminkan pemahaman bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika seluruh lapisan masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, bukan hanya segelintir yang beruntung (ANTARA, 2026).

3. Desain Kurikulum dan Model Pembelajaran: Tiga Lapisan yang Saling Melengkapi

Sekolah Rakyat mengadopsi desain kurikulum *tailor-made* yang dirancang khusus sesuai kebutuhan siswa dan konteks sosial mereka. Berbeda dari sekolah formal konvensional, Sekolah Rakyat menerapkan tiga lapisan kurikulum yang saling melengkapi (Rendratopan, 2025; Kemensos, 2025).

Lapisan pertama adalah *kurikulum persiapan* (*learner preparatory*) yang berfungsi sebagai jembatan antara kondisi awal siswa dengan standar pendidikan formal. Pada tahap ini, dilakukan pemetaan bakat dan minat melalui asesmen Talent DNA yang mencakup kesiapan fisik, mental, dan akademik. Lapisan kedua adalah *kurikulum sekolah formal* yang mengacu pada Kurikulum Merdeka sesuai standar Kemendikdasmen, mencakup pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lapisan ketiga adalah *kurikulum asrama* (*boarding curriculum*) yang mengintegrasikan pembentukan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, kedisiplinan, dan keterampilan hidup dalam rutinitas kehidupan sehari-hari di asrama.

Model *full boarding* yang diterapkan Sekolah Rakyat memiliki logika yang jelas secara empiris: banyak anak dari keluarga miskin tidak mampu belajar optimal karena kondisi rumah yang tidak kondusif—tidak ada meja belajar, tidak ada listrik yang cukup, bahkan tidak ada cukup makanan. Dengan menyediakan asrama yang memastikan gizi terpenuhi, lingkungan belajar yang kondusif, dan pendampingan selama 24 jam, Sekolah Rakyat berupaya menghapus variabel-variabel penghambat belajar yang bersifat struktural (UMJ, 2025). Selain itu, program ini juga mengintegrasikan intervensi sosial bagi keluarga siswa, termasuk renovasi rumah tidak layak huni dan pemberdayaan ekonomi orang tua, sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada level individu siswa tetapi pada level keluarga secara keseluruhan (Kementerian PAN-RB, 2025).

4. Pola Implementasi dan Capaian Awal: Akselerasi yang Masif

Dari sisi implementasi, Sekolah Rakyat mencatat progres yang luar biasa cepat sejak diluncurkan. Pada Juli 2025, program ini mulai beroperasi

di 63 titik. Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi, dengan pusat seremoni peresmian di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (ANTARA, 2026). Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat aktif pada 2026 dan hingga 500 sekolah dalam beberapa tahun ke depan, dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada 2026—naik 9,8 persen dari tahun sebelumnya (ANTARA, 2026).

Strategi implementasi yang dipilih adalah pemanfaatan aset-aset fasilitas yang sudah ada (*existing assets*), yaitu gedung-gedung milik negara yang direvitalisasi menjadi fasilitas *boarding school*. Pendekatan ini memungkinkan percepatan operasionalisasi secara signifikan sekaligus mengefisiensikan penggunaan aset negara. Rekrutmen guru dilakukan melalui skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan seleksi yang melibatkan tes akademik dan kompetensi, sementara seleksi siswa dilakukan berdasarkan data DTSEN (Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional) melalui tahapan tes psikotes, tes akademik, dan tes kesehatan yang khusus menyasar keluarga desil 1 dan 2 (Ibnu & Kurniawan, 2025).

Kajian implementasi di SRMA 10 Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Ibnu dan Kurniawan (2025) menggunakan kerangka George Edward III menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan disposisi pelaksana berjalan dengan baik pada tahap awal. Koordinasi lintas kementerian berjalan relatif lancar, dan para guru yang direkrut menunjukkan komitmen yang tinggi. Namun, dimensi sumber daya dan struktur birokrasi masih menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan tenaga pendidik yang berpengalaman dalam sistem asrama dan kompleksitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tabel berikut merangkum capaian utama program Sekolah Rakyat hingga awal 2026.

Tabel 1. Capaian Program Sekolah Rakyat (Juli 2025 – Januari 2026)

Indikator	Capaian
Jumlah sekolah aktif	166 sekolah (131 kabupaten/kota, 34 provinsi)
Jumlah siswa terlayani	15.945 siswa (Semester I TA 2025/2026)
Tenaga kerja terserap	7.107 orang (2.218 guru + 4.889 tendik)
Target 2026	200 sekolah aktif

Tabel 1. Capaian Program Sekolah Rakyat (Juli 2025 – Januari 2026)

Indikator	Capaian
Target jangka menengah	500 sekolah
Anggaran pendidikan 2026	Rp757,8 triliun (naik 9,8%)
Dasar hukum utama	Inpres No. 8/2025 + Perpres No. 12/2025

5. Sekolah Rakyat dalam Kerangka Teori Pendidikan Inklusif

Untuk memahami Sekolah Rakyat secara teoretis, perlu terlebih dahulu mendudukkan konsep pendidikan inklusif secara lebih luas. UNESCO (2017) mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai proses memastikan semua peserta didik, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pada pendidikan berkualitas di lingkungan yang menghargai keberagaman dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan pengecualian. Fionita dan Nurjannah (2024) menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif merupakan perubahan paradigma pendidikan yang menuntut transformasi pada tataran kebijakan, kelembagaan, kurikulum, dan budaya sekolah secara bersamaan.

Dalam kerangka ini, Sekolah Rakyat dapat diposisikan sebagai bentuk *pendidikan inklusif berbasis keadilan ekonomi*—sebuah model yang menjadikan kemiskinan sebagai kategori disabilitas sosial yang membutuhkan intervensi afirmatif dari negara. Dea Mustika dkk. (2023) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya tentang memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem arus utama, tetapi tentang mengubah sistem agar ia mampu merespons kebutuhan semua anak, termasuk mereka yang terpinggirkan secara ekonomi. Sekolah Rakyat, dengan model *full boarding* yang menyediakan seluruh kebutuhan dasar, secara konseptual mengoperasionalisasikan prinsip inklusivitas tersebut pada kelompok yang paling rawan tertinggal.

Kebijakan afirmatif semacam ini juga mendapat dukungan teoretis dari perspektif keadilan sosial Rawls, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila ia memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*difference principle*). Alfikri, Khodijah, dan Suryana (2022) dalam analisis kebijakan pendidikan inklusi mereka menekankan bahwa kebijakan afirmatif dalam pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga ia tidak

hanya membuka akses, tetapi juga memastikan kualitas layanan yang setara atau bahkan lebih baik bagi kelompok sasaran.

Penelitian tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia juga memperkuat urgensi program ini. Koefisien Gini Indonesia pada 2023 masih berada di angka 0,381, dan faktor rendahnya pendidikan diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan yang persisten (JIKM, 2025). Pendidikan, dalam perspektif ini, bukan sekadar hak, tetapi merupakan kunci mobilitas vertikal yang paling efektif dan paling berkeadilan.

6. Tantangan dan Kritik Akademis: Suara yang Perlu Didengar

Di balik potensi besarnya, Sekolah Rakyat menghadapi serangkaian tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kritik-kritik yang datang dari kalangan akademisi dan pemerhati pendidikan sesungguhnya merupakan kontribusi berharga yang—jika ditanggapi secara konstruktif—justru dapat memperkuat kualitas program.

a. Risiko Segregasi Sosial

Kritik yang paling sering disuarakan adalah potensi segregasi sosial. Dr. Itje Chodidjah dari UPI mengingatkan bahwa pemisahan anak berdasarkan status ekonomi dalam sistem sekolah khusus berisiko menciptakan stigma dan kelas sosial dalam pendidikan (UMJ, 2025). Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan menegaskan bahwa *"solusi sejati terletak pada penguatan sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, bukan pada segmentasi berdasarkan status sosial"* (VOI, 2025). Kekhawatiran ini relevan: anak-anak yang dikelompokkan hanya berdasarkan kemiskinan berisiko kehilangan interaksi sosial yang heterogen, yang justru merupakan salah satu pengalaman paling berharga dalam pendidikan.

b. Kesiapan dan Retensi Tenaga Pendidik

Tantangan berikutnya adalah kesiapan guru. Sistem *boarding school* menuntut kompetensi yang jauh berbeda dari sekolah reguler: guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pengasuh, motivator, dan role model selama 24 jam. Fenomena ratusan guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri pada bulan pertama operasional—karena penempatan jauh dari tempat tinggal tanpa kompensasi yang memadai—menjadi sinyal

peringatan yang serius (KBR, 2025). Ari Hardianto dari JPPI menilai minimnya transparansi dan pembekalan dari pemerintah pusat sebagai faktor penghambat utama yang perlu segera diatasi.

c. Risiko "Ilusi Pemerataan"

Fikri Muslim, peneliti BRIN, memperingatkan bahwa pembangunan akses tanpa kualitas berisiko menghasilkan *"ilusi pemerataan"*. Mengacu pada laporan World Bank tentang *learning poverty*, ia menegaskan bahwa pendidikan membutuhkan standar tinggi terhadap kurikulum, kualitas guru, dan ekosistem belajar yang terintegrasi—bukan sekadar memenuhi kuota jumlah sekolah atau siswa (The Conversation, 2026). Pola SR yang *mangkrak* di beberapa titik pada awal operasional menjadi indikasi bahwa kecepatan ekspansi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi.

d. Isu Psikologis dan Dampak Pemisahan Keluarga

Dimensi psikologis juga mendapat sorotan. Sistem asrama yang memisahkan anak dari keluarga pada usia yang relatif muda memunculkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan keterikatan keluarga (*family attachment*). Kasus nyata seorang siswa di Papua yang mengungkapkan kekhawatirannya: *"Bapak dan mama sendiri di rumah, saya jadi harapan terakhir untuk diminta bantuan oleh mereka. Siapa yang jaga bapak dan mama?"*—menggambarkan dilema emosional yang nyata yang harus dijawab oleh desain program (UMJ, 2025).

e. Keberlanjutan Anggaran dan Ketergantungan Politik

Prof. Tuti Budirahayu dari Universitas Airlangga mempertanyakan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang, terutama jika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas anggaran (Good News From Indonesia, 2025). Program yang sangat bergantung pada komitmen satu figur kepemimpinan dan alokasi APBN yang besar rentan terhadap guncangan politik dan fiskal, sebagaimana telah terbukti pada berbagai program pendidikan serupa di masa lalu.

7. Rekomendasi Penguatan: Menuju Sekolah Rakyat yang Berkelanjutan

Berdasarkan analisis atas potensi dan tantangan yang telah dipaparkan, artikel ini merumuskan empat rekomendasi strategis untuk

penguatan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

Pertama, penguatan sistem evaluasi berbasis bukti. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data riil—bukan sekadar laporan kuantitatif jumlah sekolah dan siswa. Evaluasi harus mencakup dimensi akademik, psikologis, sosial, dan dampak jangka panjang terhadap mobilitas sosial keluarga. Rekomendasi ini sejalan dengan pandangan Anwar dkk. (2025) yang mengadvokasi pendekatan CIPP dan perspektif keadilan sosial dalam evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia.

Kedua, reformasi rekrutmen dan retensi guru. Program pengembangan profesional khusus untuk guru-guru Sekolah Rakyat yang mencakup kompetensi pengasuhan asrama, penanganan trauma kemiskinan, dan pendampingan psikologis perlu segera dirancang. Insentif yang memadai—termasuk tunjangan khusus untuk penugasan di lokasi yang jauh—adalah prasyarat untuk menjaga retensi tenaga pendidik yang berkualitas (KBR, 2025).

Ketiga, integrasi dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Alih-alih menjadi sistem yang sepenuhnya terpisah, Sekolah Rakyat perlu diintegrasikan dengan ekosistem pendidikan nasional yang lebih luas. Kolaborasi dengan pesantren, sekolah negeri unggulan, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat sipil—sebagaimana direkomendasikan oleh The Indonesian Institute (2025)—dapat memperkaya model pembelajaran sekaligus mengurangi risiko segregasi sosial.

Keempat, penguatan fondasi hukum jangka panjang. Untuk mengamankan keberlanjutan program dari risiko pergantian kepemimpinan, pemerintah perlu meningkatkan status hukum Sekolah Rakyat dari level Inpres ke level Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih permanen, serta memastikan pendanaannya masuk dalam pos anggaran yang terlindungi secara hukum.

D. KESIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji secara komprehensif Sekolah Rakyat sebagai instrumen kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dari enam dimensi utama: landasan hukum, filosofi, desain

kurikulum, implementasi, posisi teoritis, serta tantangan dan rekomendasi. Dari kajian ini dapat ditarik tiga simpulan yang saling berkaitan.

Pertama, Sekolah Rakyat adalah sebuah terobosan kebijakan yang signifikan dan berani. Dengan landasan hukum yang berlapis, filosofi yang berpihak kepada rakyat termiskin, desain kurikulum tiga lapis yang holistik, dan ekspansi yang luar biasa cepat—meliputi 166 lokasi di 34 provinsi dalam kurang dari satu tahun—program ini menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk hadir bagi kelompok yang paling rentan. Dalam kerangka teori pendidikan inklusif, Sekolah Rakyat mewakili model pendidikan afirmatif berbasis keadilan ekonomi yang secara konseptual relevan dan secara operasional menjanjikan.

Kedua, tantangan yang dihadapi Sekolah Rakyat adalah nyata dan tidak boleh diremehkan. Risiko segregasi sosial, krisis retensi guru, potensi ilusi pemerataan, dimensi psikologis pemisahan keluarga, dan ketergantungan pada komitmen politik jangka pendek adalah isu-isu yang membutuhkan respons kebijakan yang serius, cepat, dan berbasis bukti. Kritik dari kalangan akademisi dan pemerhati pendidikan bukan ancaman, melainkan sumbangan berharga yang harus dijawab dengan perbaikan nyata.

Ketiga, potensi Sekolah Rakyat sebagai pilar pendidikan inklusif yang berkelanjutan sangat besar, tetapi ia tidak akan terwujud secara otomatis. Dibutuhkan penguatan sistem evaluasi, reformasi pengelolaan tenaga pendidik, integrasi dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas, dan penguatan fondasi hukum jangka panjang. Jika tantangan-tantangan ini berhasil diatasi, maka Sekolah Rakyat tidak hanya akan menjadi program pemenuhan hak dasar—ia akan menjadi monumen sejarah tentang bagaimana Indonesia memilih untuk tidak meninggalkan satu pun anaknya di pinggiran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

Buku

Kustawan, D. (2012). *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT Luxima Metro Media.

UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO Publishing.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).

Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Payung, L. T., & Heri, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. *Journal of Education Research*, 7(3), 739–750.

Arifin, A. S. (2023). Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 174–179.

Dea Mustika, Irsanti, A. Y., Evi Setiyawati, Fretika Yunita, Nurhafizdah Fitri, & Putri Zulkarnaini. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41–50. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575

Fionita, W., & Nurjannah, E. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 88–102.

Ibnu, K. I. M., & Kurniawan, T. (2025). Implementasi Kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (Studi Kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 15(1). https://doi.org/10.33007/ska.v15i1.3739

Irmawati, I., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2024). The Implementation of Inclusive Education Policy at the Elementary School Level. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 168–184.

Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner (JIKM). (2025). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia: Analisis dan Upaya Penanggulangan. *JIKM*, 9(1).

Lestariningsih, N., & Rohmadi, M. (2025). Tantangan dan Evaluasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah di Kota Palangka Raya. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4962616

Susanti, T., & Herawati, N. I. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 2(1), 64–74.

Sumber Daring dan Laporan Resmi

ANTARA News Megapolitan. (2026, 13 Januari). Memangkas Rantai Kemiskinan melalui Pendidikan Inklusif. https://megapolitan.antaranews.com/berita/482745/memangkas-rantai-kemiskinan-melalui-pendidikan-inklusif

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*. Jakarta: BPS RI.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Data Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin Ekstrem yang Tidak Bersekolah per Juni 2025. Jakarta: BPS RI.

Good News From Indonesia. (2025, 11 April). Konsep "Sekolah Rakyat" Prabowo: Solusi Inovatif atau Proyek Instan? Ini Kata Pakar UNAIR. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2025/04/11/konsep-sekolah-rakyat-prabowo-solusi-inovatif-atau-proyek-instan-ini-kata-pakar-unair

Infobalinews. (2026, 13 April). Sekolah Rakyat dalam Dinamika Akselerasi Sistem Pendidikan Bermutu. https://www.infobalinews.id/2026/04/13/sekolah-rakyat-dalam-dinamika-akselerasi-sistem-pendidikan-bermutu/index.html

KBR.ID. (2025, 8 September). Evaluasi Sekolah Rakyat: Catatan Kritis, Harapan, dan Tantangan. https://kbr.id/articles/ragam/evaluasi-sekolah-rakyat-catatan-kritis-harapan-dan-tantangan

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. (2025, 13 September). Generasi Hijau dari Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis, Masa Depan Berkelanjutan. https://kemenlh.go.id/news/detail/generasi-hijau-dari-sekolah-rakyat-pendidikan-gratis-masa-depan-berkelanjutan

Kementerian PAN-RB RI. (2025). Sekolah Rakyat, Terobosan Presiden Prabowo Putus Mata Rantai Kemiskinan. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/sekolah-rakyat-terobosan-presiden-prabowo-putus-mata-rantai-kemiskinan

Kementerian Sosial RI. (2025). *Petunjuk Teknis Sekolah Rakyat*. Jakarta: Kemensos RI. https://man15jakarta.sch.id/public/deploy/pdf/1743068809_6d2f6e8fb1c00cbd4252.pdf

Rendratopan.com. (2025, 21 Juli). Sekolah Rakyat: Pendidikan Berkualitas untuk Keluarga Miskin. https://rendratopan.com/2025/07/21/sekolah-rakyat-pendidikan-berkualitas-untuk-keluarga-miskin/

The Conversation Indonesia. (2026). 7 Ahli Membedah Program Pendidikan Prabowo, dari Sekolah Rakyat hingga Digitalisasi Pembelajaran. https://theconversation.com/7-ahli-membedah-program-pendidikan-prabowo-dari-sekolah-rakyat-hingga-digitalisasi-pembelajaran-280825

The Indonesian Institute. (2025, April). Mendorong Kebijakan Program Sekolah Rakyat Inklusif. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2025/04/Indonesia-Institute-Sekolah-Rakyat-Dyah-Larasati.pdf

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). (2025, 1 Agustus). Sekolah Rakyat Indonesia: Terobosan Pendidikan Gratis atau Kebijakan Kontroversial? https://umj.ac.id/opini/sekolah-rakyat-indonesia-terobosan-pendidikan-gratis-atau-kebijakan-kontroversial/

VOI.ID. (2025, 14 Juli). Sekolah Rakyat: Keadilan atau Segregasi Sosial dalam Pendidikan? https://voi.id/bernas/495222/sekolah-rakyat-keadilan-atau-segregasi-sosial-dalam-pendidikan